



## LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

### DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. LATAR BELAKANG**

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko oorganisasi termasuk adanya kegiatan indentifikasi, perencanaan, startegi, dan penilaian hal-hal negative yang dapat terjadi. Penerpana manajemen risiko berpijak apda konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan teriintegrasi dengan startegi manajemen. Proses atau fungsi manajemen resiko sering diterjemahkan dalam tiga Langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen resiko diharapkan dapat membuat organisasi menajdi sadar resiko dan lebih berhati-hati dalam pengambilan Keputusan dengan tujuan organisasi dapat mengambil Keputusan yang tepat dan optimal bagi organisasi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan emerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko, sehingga Organisasi Perangkat Daerah diharapkan mampu mengindentifikasi penyimpangan atas pelaksnanaan kegiatan dibandingan dengan rencana kegiatan.

Oleh karena itu diperlukan penilaian atas resiko yang dimiliki sehingga dapat ditentukan Tindakan pencegahan dan solutif terhadap resiko yang akan hidapi sesuai dengan skala penilaian risiko.

##### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

**C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2024 bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang dibutuhkan Solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan sebagai sarana pemilik risiko dalam mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah

**D. RUANG LINGKUP**

Kegiatan penilaian Resiko tahun 2024 di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak dan intensitas terjadinya resiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.

## **BAB II**

### **PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAATINI**

Dinas Perikanan selaku pelaksana urusan desentralisasi dan Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lamongan telah Menyusun register Resiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan Pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan, Adapun resiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu resiko strategis dan operasional. kondisi lingkungan pengendalian Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengndalian Intern**  
**Control Environment Evaluation ( CEE )**

No	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)											SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	Modus	
<b>A</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>												
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	4	3	4	3	3	3	2	4	2	3	3	Memadai
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>												
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	2	3	3	4	3	3	3	2	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	2	3	3	4	3	4	4	2	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	Memadai
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>												
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	Memadai



1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	Memadai
3	Insetif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	2	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	2	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	2	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	Memadai
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>													
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>													
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai

## B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan mitigasi Resiko memiliki beberapa kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai sebagaimana berikut :

1. Perlunya peningkatan evaluasi dan peningkatan kapasitas pegawai intern pengawas dalam OPD;
2. Adanya beberapa pegawai yang belum mengikuti kegiatan DIKLATPIM ataupun pelatihan pengembangan peningkatan SDM;
3. Optimalisasi peran pimpinan sebagai agen perubahan dan pemberian contoh yang baik oleh pimpinan;
4. Dokumen peta jabatan dan ANJAB masih dalam proses penyempurnaan akibat mengikuti perubahan kebijakan terkait pengelolaan kepegawaian;
5. Masih perlunya peningkatan pemahaman terhadap target dan kinerja yang hendak dicapai oleh masing-masing pegawai;
6. Perlunya tindak lanjut dalam dokumen hasil LHP secara menyeluruh.

Guna mengatasi lingkungan pengendalian yang kurang memadai di atas maka diperlukan beberapa strategi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap lingkungan pengendalian sebagaimana tabel sebagai berikut :

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Pengerjaan
1	perlunya peningkatan evaluasi dan kapasitas pengawas intern dalam OPD	Evaluasi rutin bimbingan disertai dengan tindak lanjut	Tim RB Dinas perikanan	Maret
2	Adanya beberapa pegawai belum mengikuti DIKLATPIM atau Pelatihan peningkatan SDM	Pembuatan dokumen dan pengiriman usulan serta berkoordinasi kepada BKPSDM Kabupaten Lamongan agar mendapat kuota pelatihan	Sekretaris Dinas/Kasubag Umum dan kepegawaian	Maret
3	optimalisasi peran pimpinan sebagai agen perubahan dan contoh yang baik	Pimpinan memberikan contoh kepemimpinan yang baik melalui pemberian pembinaan secara rutin kepada setiap pegawai	Kepala Dinas Perikanan	Juli
4	Dokumen peta jabatan dan anjab masih dalam proses penyuaian dengan peraturan terbaru	Koordinasi dan penyempurnaan dokumen anjab dan peta jabatan ke bagian organisasi dan BKPSDM	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Juli
5	Perlunya peningkatan pemahaman terhadap target dan kinerja yang harus dicapai	Evaluasi bimbingan melalui evaluasi dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi	Kepala Dinas Perikanan/Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Maret,Juni,September,Desember
6	Adanya beberapa pegawai belum mengikuti DIKLATPIM atau Pelatihan peningkatan SDM	Pembuatan dokumen dan pengiriman usulan serta berkoordinasi kepada BKPSDM Kabupaten Lamongan agar mendapat kuota pelatihan	Sekretaris Dinas/Kasubag Umum dan kepegawaian	Maret
7	Perlunya tindak lanjut dalam dokumen LHP secara menyeluruh	Pembuatan dokumen laporan tindak lanjut disertai dengan lampiran bukti hasil tindak lanjut temuan LHP	Kepala Dinas Perikanan	April,Juli,Oktober,Desember
8	Peningkatan kualitas terhadap instansi terkait	Perlunya peningkatan hubungan kerjasama dengan instansi terkait	Kepala Dinas Perikanan	April

### BAB III

## PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

### A. Penetapan Konteks/Tujuan

Tujuan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan selaras dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten lamongan, dimana di dalam RPJMD Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yaitu **"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan"**. Tujuan Dinas Perikanan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang hendak dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan.

Oleh karena itu guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pada Renstra Dinas Perikanan tahun 2021-2026 makan ditetapkan tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, yang selaras dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Lamongan yang dibagi menjadi 2 tujuan yaitu :

- 1. Meningkatkan Produksi Perikanan dan;**
- 2. Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan**

### B. Hasil Identifikasi Risiko

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat dijabarkan bahwa Dinas Perikanan sebagai pelaksana tugas desentralisasi sektor Pembangunan Perikanan di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis yang terbagi ke dalam resiko startegis dan resiko operasional sebagaimana matriks yang disajikan sebagai berikut :

**Tabel Matriks Resiko Strategis Dinas Perikanan**

Kertas Kerja Strategis OPD  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan		Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
No	Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena				
1	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Fishing Ground Semakin Jauh,Ketahanan terhadap alur penangkapan ikan	RST01	Kepala Dinas Perikanan	1. Penangkapan ikan Secara Berlebihan 2. Pengetahuan nelayan atas alur penangkapan ikan yang minim	Eksternal	C	1. Peningkatan biaya produksi 2. Pelanggaran terhadap batas wilayah penangkapan ikan	Nelayan			
2	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Kurangnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap,Ketersediaan dan Penjaminan Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan	RST02	Kepala Dinas Perikanan	1. Belum Optimalnya Frekuensi dan Cakupan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 2. Kurangnya Sarana Penangkapan ikan Modern	Internal	C	1. Penggunaan alat tangkap destruktif dan kerusakan ekosistem sumberdaya perikanan 2. Penggunaan alat tangkap dilarang	Nelayan			
3	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Cuaca/iklim	RST03	Kepala Dinas Perikanan	Perubahan iklim	Eksternal	UC	Berkurangnya Trip Melaut	Nelayan			
4	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Banjir	RSB01	Kepala Dinas Perikanan	Cuaca/iklim	Eksternal	UC	Gagal Panen/Hasil Panen Berkurang	Pembudidaya ikan			

5	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Penggunaan Benih ikan unggul kurang, Minimnya penerapan CBI (manajemen perikanan sehat)	RSB02	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurang penyediaan benih berkualitas 2. Budidaya masih bersifat tradisional	Internal	C	1. Hasil produksi perikanan tidak optimal 2. Budidaya ikan rawan serangan hama/Ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi	Pembudidaya Ikan
6	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Hama Penyakit Ikan, Ketersediaan Sarpras Budidaya	RSB03	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurangnya pengetahuan pengelolaan lingkungan budidaya 2. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha budidaya	Eksternal	C	1. Gagal Panen/Hasil Panen Berkurang 2. Proses budidaya masih bersifat tradisional tidak bisa berkembang	Pembudidaya Ikan
7	Indeks Harga Yang Diterima Petani (it)	Kurangnya diversifikasi/lai tambah produk hasil perikanan, Kurangnya akses pemasaran produk perikanan	R5K01	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurangnya Pengetahuan Diversifikasi produksi olahan 2. Akses pemasaran masih dibatasi oleh batas daerah	Internal	C	1. Jenis dan Nilai tambah produk perikanan rendah/belum bervariasi 2. Terbatasnya wilayah pemasaran	PELAU USAHA PERIKANAN
8	Indeks Harga Yang Diterima Petani (it)	Biaya Produksi Tinggi	R5K02	Kepala Dinas Perikanan	Tingginya biaya sarana produksi perikanan	Eksternal	C	Penurunan Kesejahteraan/Indeks harga yang diterima rendah	PELAU USAHA PERIKANAN

**Tabel Matrik Operasional Dinas Perikanan**

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Perikanan
Tahun Penilaian	2024
Periode yang Dinilai	2024
Tujuan Strategis	
Sasaran strategis OPD	
Urusan Pemerintahan	Kelautan dan perikanan
OPD yang Dinilai	Dinas Perikanan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	CUC	Uraian	Risk yang Tercitra
1	Penyediaan Sarana dan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana dan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Didasarkan	Perencanaan	Risiko Pemangku Kepentingan Data Dokumen Perencanaan Penyediaan Kebutuhan sarana Prasarana Usaha Belum Terindeks	ROT01.01	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Keterbatasan Pegawai Dinas Perikanan Penyejahteraan	Internal	C	Pemberian bantuan tidak optimal	Nelayan
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Desa/Kota	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Pelaksanaan	Risiko Fraud Adanya Kelompok Yang Belum Meningkatkan Kekelompoknya	ROT01.02	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kelengkapan Perseyaratan Berkas Kelompok Tidak memenuhi Syarat	Eksternal	C	Facilitasi Pemberian bantuan kepada kelompok tidak optimal	KUB
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelandangan Ikan (TPI)	% Tempat Pelandangan Ikan Yang Memiliki SOP	Perencanaan	Risiko Pemangku Kepentingan Terdapat beberapa TPI belum memiliki SOP	ROT01.03	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Keterbatasan Anggaran Dalam Penyusunan SOP	Internal	C	Alur Pelayanan Pelandangan Ikan Untuk Nelayan kurang optimal	Nelayan
4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelandangan Ikan (TPI)	% Tempat Pelandangan Ikan Yang Memiliki SOP	Pelaksanaan	Risiko Fraud Alur penerimaa PAD dalam pelayanan TPI belum optimal	ROT03.02	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Belum terdapatnya SOP dalam pengelolaan dan Penyelenggaran TPI	Internal	C	Penurunan PAD sektor pengelolaan	Pemerintah Kab Lamongan
5	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Yang memperoleh legitimasi pembudidayaan (Orang/Pembudidaya)	Pelaksanaan	Risiko Fraud Adanya pembudidaya/kelompok pembudidaya yang tidak mendapat akses pemerintah	ROB01.02	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Kelengkapan Perseyaratan Berkas Kelompok Tidak memenuhi Syarat	Eksternal	C	Facilitasi Pemberian bantuan kepada kelompok tidak optimal	Pembudidaya Ikan
6	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Vestuk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan	Pelaksanaan	Risiko Fraud Masih terdapatnya penggunaan alat tangkap perikanan dilarang	ROPengawas.01.02	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Kurangnya sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Perikanan	Eksternal	C	Destructive Fishing	PELAU USAHA PERIKANAN

### C. Hasil Analisis Risiko

Berdasarkan pada matriks resiko strategis dan operasional di atas maka dapat dilakukan analisis terkait skala resiko yang akan dihadapi dalam Pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan dampak risiko dapat kami sajikan melalui tabel berikut :

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
<b>Risiko Strategis OPD</b>							
1	Dinas Perikanan	Fishing Ground Semakin Jauh, Ketaatan terhadap alur penangkapan ikan	RST01	16	Kepala Dinas Perikanan	1. Penangkapan Ikan Secara Berlebihan 2. Pengelaruan nelayan atas alur penangkapan ikan yang minim	1. Peningkatan biaya produksi 2. Pelanggaran terhadap batas wilayah penangkapan ikan
2	Dinas Perikanan	Kurangnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap, Ketersediaan dan Penjaminan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	RST02	13	Kepala Dinas Perikanan	1. Belum Optimalnya Frekuensi dan Cakupan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 2. Kurangnya Sarana Penangkapan Ikan Modern	1. Penggunaan alat tangkap destruktif dan kerusakan ekosistem sumberdaya perikanan 2. Penggunaan alat tangkap dilarang
3	Dinas Perikanan	Cuaca/klim	RST03	21	Kepala Dinas Perikanan	Perubahan iklim	Berkurangnya Trip Melaut
4	Dinas Perikanan	Banjir	RSB01	16	Kepala Dinas Perikanan	Cuaca/klim	Gagal Panen/Hasil Panen Berkurang
5	Dinas Perikanan	Penggunaan Benih ikan unggul kurang, Minimnya penerapan CBI (manajemen perikanan sehat)	RSB02	11	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurang penyediaan benih berkualitas 2. Budidaya masih bersifat tradisional	1. Hasil produksi perikanan tidak optimal 2. Budidaya ikan rawan serangan hama/Ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi
6	Dinas Perikanan	Hama Penyakit Ikan, Ketersediaan Sarpras Budidaya	RSB03	15	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurangnya pengetahuan pengelolaan lingkungan budidaya 2. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha budidaya	1. Gagal Panen/Hasil Panen Berkurang 2. Proses budidaya masih bersifat tradisional tidak bisa berkembang
7	Dinas Perikanan	Kurangnya diversifikasi/lai tambah produk hasil perikanan, Kurangnya akses pemasaran produk perikanan	RSK01	18	Kepala Dinas Perikanan	1. Kurangnya Pengetahuan Diversifikasi produksi olahan 2. Akses pemasaran masih dibatasi oleh batas daerah	1. Jenis dan Nilai tambah produk perikanan rendah/belum bervariasi 2. Terbatasnya wilayah pemasaran
8	Dinas Perikanan	Biaya Produksi Tinggi	RSK02	19	Kepala Dinas Perikanan	Tingginya biaya sarana produksi perikanan	Penurunan Kesejahteraan/Indeks harga yang diterima rendah

Adapun rencana tindak pengendalian ( RTP ) terhadap risiko di atas yang berisi jadwal, celah pengendalian, pemilik/penanggung jawab, serta jadwal rencana target waktu penyelesaian risiko yang dihadapi dapat dijelaskan melalui matriks formulir kertas kerja sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja							
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian yang Ada Dan Masih Dibutuhkan							
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian		2024					
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan		Kelautan dan perikanan					
Dinas Terkait		Dinas Perikanan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:</b>							
1	Fishing Ground Semakin Jauh Kestabilan terhadap sur penangkapan ikan	RST01	Sosialisasi dan pembelian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perikanan Kabupaten Lamongan	Belum pahamnya alur penangkapan ikan dih relay	Sosialisasi dan pembelian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perikanan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Juli
2	Kurangnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Ketersediaan dan Penjaminan Serupa dan Prasarananya Penangkapan ikan	RST02	Frekuensi legitan pengawasan masih sedikit dan pemberian bantuan serupa penangkapan ikan	Cukup walaupun pengawasan terbatas dan terbatasnya bantuan serupa penangkapan ikan	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pengawasan	Kepala Bidang pengawasan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Juli
3	Cuaca/klim	RST03	Pembagian peta prakiraan cuaca	Cuaca/klim tidak dapat diketahui	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Kepala Dinas Perikanan	Maret
4	Banjir	RSB01	Pembagian peta prakiraan cuaca	Cuaca/klim tidak dapat diketahui	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Kepala Dinas Perikanan	Maret
5	Pengurusan Benih ikan unggul kurang Minimnya penerapan CBB ( manajemen perikanan sehat )	RSB02	Pembinaan budidaya perikanan dan penyediaan bantuan benih unggul	Cukup pemberian bantuan benih unggul dan rendahnya tingkat penggunaan benih unggul	Revisi CBB Kabupaten Lamongan sebagai bentuk intervensi pengurusan benih unggul	Kepala Dinas Perikanan	Agustus
6	Harus Penyikat ikan Ketersediaan Serupa Budidaya	RSB03	Sosialisasi HPI dan bantuan serupa budidaya	Rendahnya pengetahuan budidaya tentang pemahaman HPI ikan	Money dan Lab.Kesehatan Keliling	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Juni
7	Kurangnya diversifikasi/tambahan produk hasil perikanan Kurangnya akses pemasaran produk perikanan	RSK01	Pelatihan olahan hasil perikanan	Produk Olahan perikanan belum terstandarisasi dengan optimis	Facilitasi pemerintah untuk memperluas pemasaran produk olahan perikanan	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Oktober
8	Biaya Produksi Tinggi	RSK02	Bantuan serupa produksi perikanan	Tingkat intervensi bantuan dalam meredam biaya produksi	Optimisasi dan pengurangan bantuan serupa produksi perikanan	Kepala Dinas Perikanan	Oktober
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:</b>							
1	Risiko Penyalahgunaan Data Dokumen Perencanaan Penyediaan Kebutuhan sarana Prasarana Usaha Belum Tersedia	ROT01.01	Penyebarluasan sarana prasarana perikanan masih mengacu kepada usulan	Cukup peneriman bantuan	Penyebarluasan berdasarkan dokumen perencanaan pengembangan penyediaan serupa perikanan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Oktober
2	Risiko Fraud Adanya Kelompok Yang Belum Meningkat Kelas Kelompoknya	ROT01.02	Kelas kelompok rata-rata masih pemula	Kurangnya kesadaran administrasi kelompok	Pembinaan dan pendampingan administrasi kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Oktober
3	Risiko Penyalahgunaan Terdapat beberapa TPI belum memiliki SOP	ROT01.03	Tersedianya SOP dalam pelayanan TPI	SOP Belum dilaksanakan secara maksimal	Sosialisasi pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Mei
4	Risiko Fraud Alur penerimaan PAD dalam pelayanan TPI belum optimal	ROT01.04	Kerjasama dengan Bank Dalam pembayaran penerimaan PAD	Terdapat alur penerimaan PAD	Optimisasi digital banking melalui layanan QRIS	Kepala Dinas Perikanan	Mei
5	Risiko Fraud Adanya pembudidaya kelompok pembudidaya yang tidak mendapat akses pembiayaan	ROT01.02	Sosialisasi dan pendampingan kelompok	Kelengkapan berkas administrasi kelompok	Pendampingan administrasi kelompok	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Koordinator penyuluhan	Juli
6	Risiko Fraud Masing penggunaan alat tangkap perikanan diatas	ROT01.02	Sosialisasi dan pendampingan terhadap nelayan yang ter tangkap operasi	Rasio penggunaan alat tangkap yang diatas masih rendah	Optimisasi pemberian alat penganti ramah lingkungan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Oktober

## D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan terhadap penanggulangan risiko startegis dan operasional yang telah diidentifikasi dan telah dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam matriks tabel sebagai berikut :

**Formulir Kertas Kerja**  
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2024					
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan	Kelautan dan perikanan					
Dinas Terkait	Dinas Perikanan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:</b>						
1	Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal	Berita acara pelaksanaan kegiatan dan penerimaan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret,Agustus	Juni	Telah dilaksanakan
2	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pengawasan	Dokumen hasil pemeriksaan	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan (Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan)	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan
3	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Dokumen peta prakiraan cuaca	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan
4	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Dokumen peta prakiraan cuaca	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan
5	Revitalisasi BBi Kabupaten Lamongan sebagai bentuk intervensi penyediaan benih unggul	Dokumen pengawasan revitalisasi BBi	Crosscheck progress pembangunan fisik lapangan (Kabid Perikanan Budidaya)	Juni,Agustus	Juni	Dilaksanakan kunjungan lapangan
6	Monev dan Lab.Kesehatan Keliling	Dokumen hasil uji kesehatan ikan dan lingkungan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan pemantauan Lab Keliling
7	Fasilitasi pameran untuk memperluas pemasaran produk olahan perikanan	Laporan pelaksanaan hasil kegiatan pameran	Kepala Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Juli	Belum dilaksanakan	Info pameran masih dicari
8	Optimalisasi dan peningkatan bantuan sarpras produksi perikanan	Dokumen proposal penerima Hibah, dan SKT Kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Pelaksanaan pemberian bantuan masih dilaksanakan sebagian
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:</b>						
1	Penyediaan bantuan berdasarkan dokumen perencanaan pengembangan penyediaan sarpras perikanan	Input usulan masyarakat melalui SIPD	Kesubag Perencanaan dan Evaluasi	Januari	Januari	Telah dilakukan pemantauan
2	Pembinaan dan pendampingan administrasi kelompok	Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kelompok	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Pendampingan telah dilakukan
3	Sosialisasi pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Evaluasi kepatuhan penerapan pelayanan SOP Pelayanan TPI	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPT.TPI	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Evaluasi dilakukan secara rutin tribulanan
4	Optimalisasi digital banking melalui layanan QRIS	Crosscheck laporan penerimaan PAD dengan kards retribusi	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPT.TPI serta Bank Jatim	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Evaluasi penerimaan PAD dilakukan secara rutin
5	Pemndampingan administrasi kelompok	Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kelompok	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Checklist kelengkapan dokumen
6	Optimalisasi pemberian alat penganti ramah lingkungan	Proposal Usulan kelompok dan SKT Kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Maret-Agustus	Maret	Pelaksanaan masih pada tahap I di bulan maret

## E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Formulir Kertas Kerja Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Adu Dan Masih Dibutuhkan							
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2024						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Kelautan dan perikanan						
Dinas Terkait	Dinas Perikanan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *	Cetah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:</b>							
1	Fishing Ground Semakin Iauh/Ketidak terhadepl alur penangkapan ikan	RST01	Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan	Belum pahamnya alur penangkapan ikan oleh masyarakat	Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Juli
2	Kurangnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap/Ketersediaan dan Penjaminan Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan	RST02	Frekuensi kegiatan pengawasan masih sedikit dan pemberian bantuan sarpras penangkapan ikan	okupasi wilayah pengawasan terbatas dan terbatasnya bantuan sarpras penangkapan ikan	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pengawasan	Kepala Bidang pengawasan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Juli
3	Cuaca/klim	RST03	Pembagian peta prakiraan cuaca	Cuaca/klim tidak dapat dikendalikan	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Kepala Dinas Perikanan	Maret
4	Banjir	RSB01	Pembagian peta prakiraan cuaca	Cuaca/klim tidak dapat dikendalikan	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Kepala Dinas Perikanan	Maret
5	Penggunaan Benih ikan unggul kurang Minimnya penerapan CBB (manajemen perikanan sehat)	RSB02	Pembinaan budidaya perikanan dan penyediaan bantuan benih unggul	Cukupnya pemberian bantuan benih unggul dan rendahnya tingkat penggunaan benih unggul	Revitalisasi BBi Kabupaten Lamongan sebagai bentuk intervensi penyediaan benih unggul	Kepala Dinas Perikanan	Agustus
6	Hama Penyikat ikan/Ketersediaan Sarpras Budidaya	RSB03	Sosialisasi HR dan bantuan sarpras budidaya	Rendahnya pengertian budidaya tentang pemahaman HR ikan	Monev dan Lab.Kesehatan Keliling	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Juni

7 Kurangnya diversifikasi tambah produk hasil perikanan.Kurangnya akses pemasaran produk perikanan	RSK01	Pelatihan olahan hasil perikanan	Produk Olahan perikanan belum terandervasi dengan optimal.	Facilitasi pameran untuk memperluas pemasaran produk olahan perikanan	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Oktober
8 Biaya Produksi Tinggi	RSK02	Bantuan serpas produksi perikanan	Tingkat intervensi bantuan dalam menekan biaya produksi	Optimisasi dan peningkatan bantuan serpas produksi perikanan	Kepala Dinas Perikanan	Oktober
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:</b>						
1 Risiko Pemangku Kepentingan Data Dokumen Perencanaan Penyejahteraan Kebutuhan sarana Prasarana Usaha Belum Tersedia	ROT01.01	Penyejahteraan sarana prasarana perikanan masih mengeluarkan kelebihan usulan	Cukupan penerimaan bantuan	Penyejahteraan bantuan berdasarkan dokumen perencanaan pengembangan penyejahteraan sarpas perikanan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Oktober
2 Risiko Fraud Adanya Kelompok Yang Belum Meningkat Kelar Kelompoknya	ROT01.02	Kelas kelompok rata-rata masih pemula	Kurangnya kesadaran administrasi kelompok	Pembinaan dan pendampingan administrasi kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Oktober
3 Risiko Pemangku Kepentingan Terdapat beberapa TPI belum memiliki SOP	ROT01.03	Tersedianya SOP dalam pelayanan TPI	SOP Belum dilaksanakan secara maksimal	Sosialisasi pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Mei
4 Risiko Fraud Alur penerimaan PAD dalam pelayanan TPI belum optimal	ROT03.02	Kerjasama dengan Bank Dalam pembayaran penerimaan PAD	Terdapat selisih penerimaan PAD	Optimisasi digital banking melalui layanan QRIS	Kepala Dinas Perikanan	Mei
5 Risiko Fraud Adanya pembudidaya/kelompok pembudidaya yang tidak mendapat akses pemodelan	ROB01.02	Sosialisasi dan pendampingan kelompok	Kelengkapan berkas administrasi kelompok	Pendampingan administrasi kelompok	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Koordinator penyuluhan	Juli
6 Risiko Fraud Meski tingginya penggunaan alat tangkap perikanan dilarang	ROPengawas01.02	Sosialisasi dan pendampingan terhadap nelayan yang bertangkap operasi	Rasio penggunaan alat tangkap yang dilarang masih rendah	Optimisasi pemberian alat penganti ramah lingkungan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Oktober

## BAB IV

### Rancangan Informasi dan Komunikasi

Kesuksesan Pengendalian risiko startegis dan operasional OPD salah satunya dipengaruhi oleh faktor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi diperlukan dalam penyampaian risiko strategis dan operasional serta rencana tindak pengendalian dalam menangani terjadinya risiko dalam Pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan. Berikut akan dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Dinas Perikanan ke dalam matriks sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun						
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2024				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		Kelautan dan perikanan				
Dinas Terkait		Dinas Perikanan				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:</b>						
1	Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPPI) Perairan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal	Pemberian modul pembagian alur penangkapan ikan	Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perikanan Lamongan	Nelayan	Maret	April
2	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pengawasan	Dokumen MOU	Dinas Perikanan	Pelaku Usaha Perikanan	Maret,Juni,September	-
3	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Pemberian Peta Prakiraan Cuaca	BMKG Juanda	Nelayan	Januari-Desember	Januari-Juni
4	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Pemberian Peta Prakiraan Cuaca	BMKG Juanda	Nelayan	Januari-Desember	Januari-Juni
5	Revitalisasi BBII Kabupaten Lamongan sebagai bentuk intervensi penyediaan benih unggul	Sosialisasi dan Website OPD	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	Pembudidaya Ikan	Maret	April
6	Monev dan Lab.Kesehatan Keliling	Pengumuman jadwal monev Lab.Kesehatan ikan keliling melalui papan pengumuman dan website OPD	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	Pembudidaya Ikan	Maret,Juni	Maret,Juni
7	Fasilitasi pameran untuk memperluas pemasaran produk olahan perikanan	Sosialisasi dan Website OPD	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	Pelaku Usaha Perikanan	Maret,Juni,September	Juni
8	Optimalisasi dan peningkatan bantuan sarpras produksi perikanan	Sosialisasi kepada kelompok penerima bantuan hibah	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	Pelaku Usaha Perikanan	Maret,Juni,September	Juni
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:</b>						
1	Penyediaan bantuan berdasarkan dokumen perencanaan pengembangan penyediaan sarpras perikanan	Kamus Usulan Dinas Perikanan (SIPD-R)	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	Pelaku Usaha Perikanan	Januari	Januari
2	Pembinaan dan pendampingan administrasi kelompok	Sosialisasi	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	KUB,POKDAKAN,POKMASWAS,POKLAHSAR	Maret,Juni,September	Maret,Juni,September
3	Sosialisasi pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Sosialisasi dan pembuatan papan informasi alur pelayanan TPI	UPT.Tempat Pelelangan Ikan	Pengguna Layanan TPI	Maret,Juni,September	Maret,Juni,September
4	Optimalisasi digital banking melalui layanan QRIS	Sosialisasi kepada nelayan melalui pengeras suara	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dan Bank Jatim Capem Lamongan	Pengguna Layanan TPI	Maret,Juni,September	Maret,Juni,September
5	Pendampingan administrasi kelompok	Sosialisasi	Dinas Perikanan	KUB,POKDAKAN,POKMASWAS,POKLAHSAR	Maret,Juni,September	Maret,Juni,September
6	Optimalisasi pemberian alat pengganti ramah lingkungan	Sosialisasi dan pemberian buku alat tangkap yang dilarang	Dinas Perikanan Lamongan	Pelaku usaha penangkapan ikan	Juni	Juni

## BAB V

### Rancangan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu faktor dalam penentuan keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan kinerja organisasi perangkat daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas Pembangunan sektor Perikanan, guna menghadapi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan yang dapat kami kabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut :

Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2024				
Tujuan Strategis Pemda		Kelautan dan perikanan				
Urusan Pemerintahan						
Dinas Terkait		Dinas Perikanan				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Perikanan:</b>						
1	Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan ( WPP ) Perairan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal	Berita acara pelaksanaan kegiatan dan penerimaan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret,Agustus	Juni	Telah dilaksanakan
2	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pengawasan	Dokumen hasil pemeriksaan	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan (Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan)	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan
3	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Dokumen peta prakiraan cuaca	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan
5	Revitalisasi BBI Kabupaten Lamongan sebagai bentuk intervensi penyediaan benih unggul	Dokumen pengawasan revitalisasi BBI	Crosscheck progress pembangunan fisik (lapangan ( Kabi.Diperikanan Budidaya )	Juni,Agustus	Juni	Dilaksanakan kunjungan lapangan
6	Monev dan Lab.Kesehatan Keliling	Dokumen hasil uji kesehatan ikan dan lingkungan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Telah dilaksanakan pemantauan Lab.Keliling
7	Facilitasi pameran untuk memperluas pemasaran produk olahan perikanan	Laporan pelaksanaan hasil kegiatan pameran	Kepala Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Juli	Belum dilaksanakan	Info pameran masih dicari
8	Optimalisasi dan peningkatan bantuan sarpras produksi perikanan	Dokumen proposal penerima Hibah, dan SKT Kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Pelaksanaan pemberian bantuan masih dilaksanakan sebagian
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Perikanan:</b>						
1	Penyediaan bantuan berdasarkan dokumen perencanaan pengembangan penyediaan sarpras perikanan	Input usulan masyarakat melalui SiPD	Kesubag Perencanaan dan Evaluasi	Januari	Januari	Telah dilakukan pemantauan
2	Pembinaan dan pendampingan administrasi kelompok	Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Pendampingan telah dilakukan
3	Sosialisasi pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Evaluasi kepatuhan penerapan pelayanan SOP Pelayanan TPI	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPT.TPI	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Evaluasi dilakukan secara rutin tribulanan
4	Optimalisasi digital banking melalui layanan QRIS	Crosscheck laporan penerimaan PAD dengan karcis retribusi	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPT.TPI serta Bank Jatim	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Evaluasi penerimaan PAD dilakukan secara rutin
5	Pemndampingan administrasi kelompok	Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kelompok	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Maret,Juli,September	Maret,Juli,September	Checklist kelengkapan dokumen
6	Optimalisasi pemberian alat pengganti ramah lingkungan	Proposal Usulan kelompok dan SKT Kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Maret,Agustus	Maret	Pelaksanaan masih pada tahap I di bulan maret

## BAB VI

### PENUTUP

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan telah Menyusun dokumen dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah dan semoga dokumen penilaian risiko tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai panduan dalam penanganan dan identifikasi risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD dalam Pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan.

